



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

RISALAH RAPAT

- Hari/Tanggal** : Rabu, 7 Juni 2017
Waktu : 14.30 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Grand Mercure Kemayoran
Jl. H. Benyamin Sueb Kav. B6 Kemayoran
Perihal : Rapat Tindak Lanjut Rapat Terbatas (RATAS) Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Kalimantan Tengah
- Peserta** : Hadir:
Kemenko Perekonomian
Sekretariat Kabinet
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian BUMN
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (Kemen PUPR)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- Tidak Hadir:
Kementerian Keuangan
PT Perusahaan Listrik Negara

Agenda Rapat : Pembahasan tindak lanjut RATAS PSN di Provinsi Kalimantan Tengah

Pembahasan :

Kereta Api Purukcahu - Bangkuang

Kemenko Perekonomian:

- Revisi MoU antara PT PTB dengan para penambang telah disampaikan pada rapat tanggal 22 Mei 2017, namun perusahaan penambang meminta agar MoU yang diusulkan dapat bersifat lebih umum terlebih dahulu, selanjutnya PTB dapat melanjutkan ke *Coal Transport Agreement (CTA)*.
- Revisi draft MoU dalam waktu dekat akan disampaikan kepada perusahaan penambang.
- Pada tanggal 29 Mei 2017, telah ditetapkan bahwa kerjasama antara PT PTB dengan Petambang dilakukan dengan skema *Business-to-Business*.
- Saat ini PT PTB sedang dalam proses permohonan IPPKH yang sedang diproses di Kementerian LHK. Selanjutnya, dibutuhkan konfirmasi terkait pihak yang wajib melakukan pembayaran PNBPN di antara Pemerintah Provinsi atau PT PTB.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:

- PMK No. 60/2017 terkait kebutuhan jaminan Perintah atas risiko politik telah disampaikan kepada Pemprov Kalteng.



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

- Saat ini yang dibutuhkan adalah dukungan untuk pembebasan lahan namun masih menunggu penetapan trase jalur kereta api. Diharapkan agar Pemprov dapat segera memberikan kepastian tanggal rencana jalur KA tersebut. Kemenkeu sedang menyiapkan draft MoU terkait sarana KA sebagai pendukung proyek. Kemenkeu sedang menyiapkan *draft* untuk pemberian jaminan Pemerintah Pusat tetapi belum dilakukan diskusi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi.

Kementerian Perhubungan:

- Dalam upaya integrasi *Masterplan*, telah dilakukan pendekatan dengan Pemerintah Daerah, namun prosesnya menjadi terhambat karena ada jalur kereta api baru yang sudah konstruksi namun belum mendapatkan izin penetapan trase. Konstruksi oleh perusahaan kereta api swasta ini berlokasi di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
- Studi trase dan DED proyek Kereta Api Purukcahu - Bangkuang dari Banjarmasin ke Palangkaraya telah selesai. Sedangkan studi trase dan DED dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara serta Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat belum dilakukan.

Bandara Tjilik Riwut

Perwakilan Kementerian Perhubungan untuk PSN Pelabuhan:

- Proyek ini lebih tepat disebut sebagai pembangunan terminal baru dibandingkan revitalisasi bandara.
- Pada tanggal 2 Juni 2017, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan telah mengadakan rapat alih status Barang Milik Negara (BMN), dimana terdapat kebutuhan jalan akses menuju bandara yang saat ini statusnya masih Jalan Nasional.
- Pada rapat tersebut telah disepakati bahwa Kementerian Perhubungan akan mengirimkan surat kepada Kementerian PUPR terkait permohonan alih status BMN termasuk data-data pendukung sebagai syarat pengalihan BMN.

Kementerian PPN/Bappenas:

- Telah dilakukan rapat lanjutan pengalihan BMN, dan disepakati bahwa Kementerian Perhubungan akan mengirimkan surat permohonan pemanfaatan BMN kepada Satuan Kerja dari Bina Marga. Jika persyaratan sudah terpenuhi maka Kementerian PUPR akan meneruskan permohonan ke DJKN, Kementerian Keuangan.

Program Ketenagalistrikan

Kementerian ESDM

- Setelah dikaji ulang, penambahan kapasitas listrik yang dibutuhkan sampai 2019 ternyata lebih dari 330 MW. (PLTMG Bangkanai 140 MW, PLTU Pulang Pisau 60 MW, PLTU Sampit 50 MW, PLTMG Kalteng 100 MW, PLTBm Kotawaringin Barat 10 MW).

Tindak Lanjut:

No	Proyek	Tindak Lanjut	Pelaksana	Target Pelaksanaan
1	Kereta Api Purukcahu - Bangkuang - Batanjung	1. Pemprov Kalteng akan melakukan <i>follow up</i> dengan Kemenkeu dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan agar Perjanjian Penjaminan dapat diterbitkan paling lambat 23 Juni 2017	Pemprov Kalteng, Kementerian Keuangan	Penandatanganan Perjanjian Penjaminan paling lambat 23 Juni 2017
		2. Deputi 3 akan mengadakan rapat koordinasi pembahasan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran PNPB dalam rangka percepatan penerbitan IPPKH	Deputi 3 Kemenko Prekonomian	
		3. Deputi 3 akan mendorong percepatan finalisasi MoU oleh PT PTB dan memfasilitasi penyampaian draft kepada perusahaan penambang lainnya untuk mendapatkan masukan. MoU diharapkan dapat ditandatangani paling lambat pada 23 Juni 2017	Deputi 3 Kemenko Prekonomian	<i>untuk didiskusikan</i>
2	Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya	1. Kemenhub akan mengirimkan surat Menteri Perhubungan untuk permohonan alih status pemanfaatan BMN yaitu atas jalan nasional menjadi jalan akses kepada Menteri PUPR paling lambat 12 Juni 2017.	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR	12 Juni 2017



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

		2. Kementerian PUPR akan mengirimkan surat pemanfaatan BMN kepada DJKN, Kemenkeu setelah menerima surat dari Menteri Perhubungan. Koordinasi akan didukung Kementerian PPN/Bappenas.	Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan	Sebelum 23 Juni 2017
		3. Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR akan melakukan <i>sounding</i> ke DJKN agar dapat mempersiapkan percepatan untuk proses pemanfaatan BMN yang diminta	Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan	Sebelum 23 Juni 2017
		4. Kemenhub akan mengirimkan data terkait status terakhir pembangunan kepada Kemenko Ekon.	Kementerian Perhubungan	12 Juni 2017
3	Program Ketenagalistrikan	1. Mengirimkan Rencana Aksi rinci terkait rencana penyediaan ketenagalistrikan sebesar 410 MW sampai tahun 2019 kepada Kemenko Ekon.	Kementerian ESDM	12 Juni 2017